



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT**

JL. TERATAI NO.10 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT, 34812  
TELP. (078) 21144, FAX (0728) 21144

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun, seraya mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berikutnya.



Liwa, Januari 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lampung Barat

**REZA MAHENDRA, SH.M.H.**

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 1 Sasaran Strategis

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dalam mencapai target Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikatornya Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi dengan target capaian kinerja tahun 2023 adalah target 35% mencapai 42,7%. Di samping itu, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Realisasi anggaran belanja (termasuk gaji dan belanja operasional) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 2.905.338.089 dari total anggaran sebesar Rp 3.024.066.184 sehingga Dinas Perhubungan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 118.728.095 atau capaian kinerjanya 96.07%

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Tugas dan Fungsi .....	8
C. Struktur Organisasi .....	9
D. Peran Strategis Perangkat Daerah .....	10
E. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	12
1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	12
2. Program dan Kegiatan Pembangunan .....	14
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....	15
C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra .....	26
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	27
A. Analisis Sumber Daya Manusia .....	27
B. Analisis Sarana dan Prasarana .....	30
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 .....	31
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja .....	32
B. Perbandingan Kinerja .....	35
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	35
2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional .....	35
3. Perbandingan Kinerja dengan target dan atau capaian kinerja Tingkat Provinsi Lampung .....	36
4. Benchmarking .....	37
C. Realisasi Anggaran .....	37
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja .....	39
E. Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik .....	-
BAB V PENUTUP	40
A. Simpulan Umum .....	40
B. Faktor Pendukung Keberhasilan .....	41
C. Permasalahan .....	41
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	41
LAMPIRAN	
Lampiran I Dokumentasi Kegiatan Pembangunan .....	
Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahannya .....	
Lampiran III Rencana Aksi Kinerja Per Kegiatan .....	
Lampiran IV Daftar Penghargaan .....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel A.1 Strategi, dan Arah Kebijakan .....	12
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja .....	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama .....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan .....	15
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan .....	16
Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 .....	26
Tabel III.A.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember 2023 .....	27
Tabel III.A.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	27
Tabel III.A.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	28
Tabel III.A.4 Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan .....	28
Tabel III.A.5 Jumlah PNS Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	28
Tabel III.A.6 Jumlah PNS Berdasarkan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa .....	29
Tabel III.A.7 Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Teknis Perhubungan dan Teknis Lainnya .....	29
Tabel III.B.1 Sarana dan Prasarana .....	30
Tabel III.C.1 Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023 .....	31
Tabel IV.A.1 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama .....	32
Tabel IV.A.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat Tahun 2023 .....	34
Tabel IV.A.3 Data Kendaraan Umum dan Data Kendaraan Yang Layak Beroperasi .....	34
Tabel IV.B.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat .....	35
Tabel IV.B.2 Analisis Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan RI .....	35
Tabel IV.B.3 Analisis Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 .....	36
Tabel IV.C.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	9
Gambar 2 Alat Uji Timbangan ( Axle Load Portable) .....	42
Gambar 3 Zoss ( Zona Selamat Sekolah) .....	43
Gambar 4 Alat Uji Rem Kendaraan (Brake Tester) .....	44
Gambar 5 Peralatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor .....	45
Gambar 6 Launching Damri Perintis Liwa – Kebun Tebu, Kebun Tebu – Liwa dan Ram Check .....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik telah menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia. Salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik tersebut salah satu asas yang harus dilaksanakan adalah Azas Akuntabilitas yaitu asas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berazaskan desentralisasi (otonomi daerah), maka dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, Kepala Daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerja keuangan daerah.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, diperlukan suatu laporan kinerja yang menjelaskan pertanggungjawaban pencapaian kinerja sekaligus kinerja keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Dimana Setiap akhir tahun anggaran, OPD diwajibkan untuk membuat laporan kinerja yang akan dirangkum menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya sebagai aturan pelaksana, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Perangkat Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah berbagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Oleh karena itu terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara akuntabel, berhasil dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi satu bagian Sekretaris dan tiga bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas , terdiri atas :
  1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas :
  1. Seksi Sarana
  2. Seksi Prasarana
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri atas
  1. Seksi Angkutan Penumpang
  2. Seksi Angkutan Barang
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis



### C. Struktur Organisasi

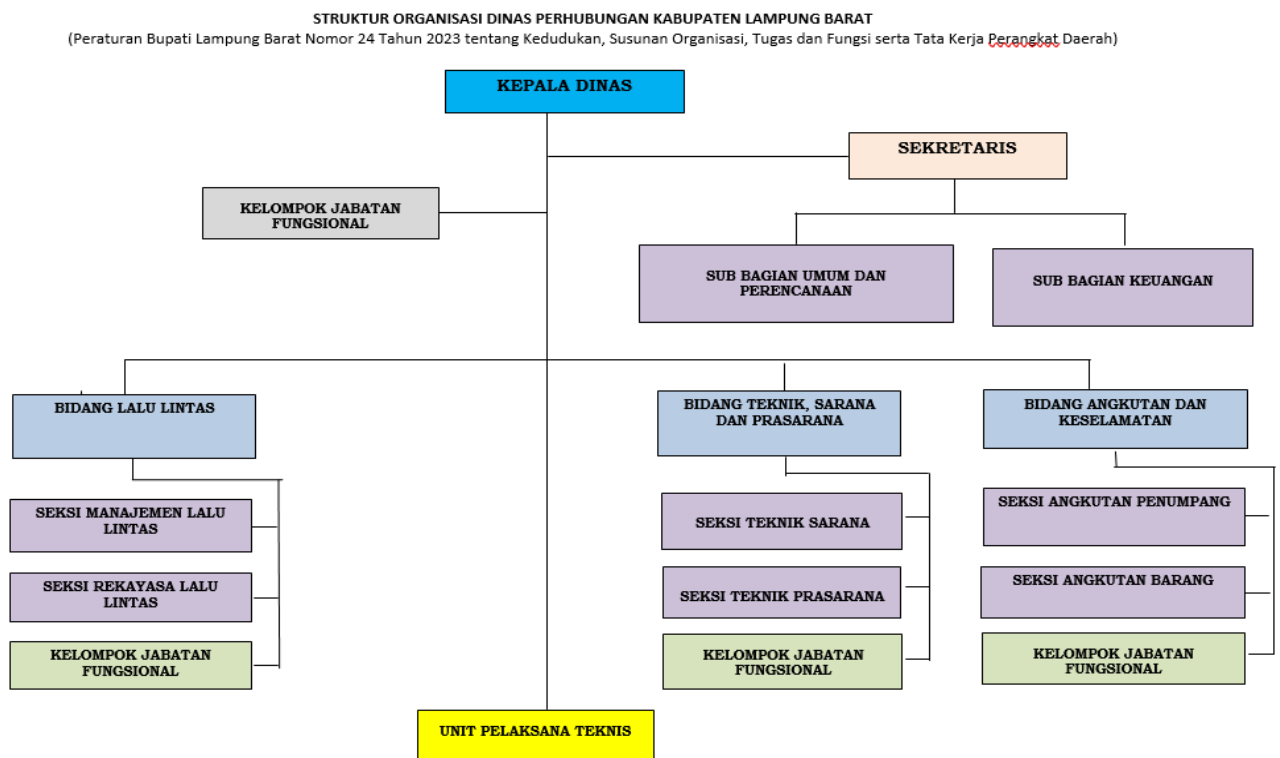
Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan'
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1:**

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Perub Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

#### **D. Peran Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang perhubungan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

**Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut:**

- 1) Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- 2) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang lengkap serta kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk melaksanakan pengujian kelayakan kendaraan bermotor;
- 4) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 5) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;
- 6) Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
- 7) Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
- 8) Tingginya minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi.
- 9) Beralihnya fungsi angkutan umum perkotaan dan angkutan pedesaan menjadi kendaraan Abudemen untuk para pelajar.
- 10) Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
- 11) Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
- 12) Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas penggunajalan;

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia teknis perhubungan;
2. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal;
3. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya;
4. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu dan perlengkapan jalan;
5. Belum terpenuhinya secara maksimal alat uji kendaraan bermotor.

Berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi/ Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

### A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

#### 1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 - 2026

**Tabel A. 1 .**  
Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Strategi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Arah Kebijakan 1 : Penyediaan Sarana/fasilitas/perengkapan/database bidang perhubungan yang mendukung system jaringan transportasi dan penataan kota. Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana/fasilitas/perengkapan jalan yang memadai dan berorientasi pada keselamatan
		Strategi 2 : Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Arah Kebijakan 2 : Pelatihan tenaga penguji kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pelayanan dan kualitas hasil pengujian kendaraan serta meningkatkan kesadaran pengusaha angkutan bermotor guna melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun

2026, yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan rencana Pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan serta sub kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana indikator yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Persen (%)	Jumlah Kendaraan yang ada di Kabupaten Lampung Barat	$\frac{\sum \text{Kendaraan Umum Yang Layak Operasi}}{\sum \text{Seluruh Kendaraan Umum}} \times 100$	Data Dishub

## 2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam Tahun Anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan program-program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

## B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana/proses mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi agar lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%

Program	Anggaran	Sumber Dana
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.812.225.680	APBD TA. 2023
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	402.128.450	APBD TA. 2023

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya PMK 212, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%

Program	Anggaran Perubahan	Sumber Dana
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.521.937.734	APBD TA. 2023
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	402.128.450	APBD TA. 2023



**Tabel 2.5**  
**Kerangka Pendanaan Tahun 2023**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Usulan	Pagu Pengesahan/Murni	Pagu Pengeseran I	Pagu Pengeseran II	Pagu Perubahan
1	2	3	6	8	8	8	10
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		4.229.999.771	3.214.354.130	3.021.960.412	3.021.960.412	3.024.066.184
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		4.229.999.771	3.214.354.130	3.021.960.412	3.021.960.412	3.024.066.184
2.15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	3.500.706.792	2.812.225.680	2.619.831.962	2.619.831.962	2.621.937.734
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.436.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Jumlah dokumen Penggangan Daerah yang disusun	26.165.800	19.130.600	19.130.600	19.130.600	19.130.600
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.764.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.370.228.300	2.180.672.400	2.044.928.682	2.044.928.682	2.044.499.454

		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.227.600	2.047.600	2.047.600	2.047.600	2.047.600
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.310.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
X XX 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56.910.000	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.439.000	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	96.758.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000	-	-	-	-

X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.259.000	8.256.000	8.256.000	8.256.000	8.256.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42.000.000	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.200.000	-	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	47.261.500	36.041.900	36.041.900	36.041.900	36.041.900
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.746.000	4.746.000	4.746.000	4.746.000	4.746.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.279.000	53.820.000	45.170.000	45.170.000	71.205.000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8.250.000	-	-	-	-
X XX 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	39.350.000	27.545.000	27.545.000	27.545.000	27.545.000

	Pemerintahan Daerah	Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	117.810.000	117.770.000	117.770.000	117.770.000	117.770.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	218.771.100	147.810.850	147.810.850	147.810.850	124.310.850
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	217.306.192	171.101.330	123.101.330	123.101.330	123.101.330
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	716.179.979	402.128.450	402.128.450	402.128.450	402.128.450
		Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar					
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	-	-	-
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	185.355.349	-	-	-	-

		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	-	-	-	-
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	13.486.000	15.315.000	15.315.000	15.315.000	15.315.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	-	-	-	-
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	12.682.250	12.682.250	12.682.250	12.682.250	12.682.250
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-

		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	153.124.000	51.041.300	51.041.300	51.041.300	51.041.300
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	189.625.000	189.625.000	189.625.000	189.625.000	189.625.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-

		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	27.831.500	27.827.500	27.827.500	27.827.500	27.827.500
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	97.776.880	79.787.400	79.787.400	79.787.400	79.787.400
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.449.000	-	-	-	-
2.15.03	PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	13.113.000	-	-	-	-



2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	-	-	-	-	-
		Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-	-	-	-	-
		Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	13.113.000				
<b>TOTAL</b>			<b>4.229.999.771</b>	<b>3.214.354.130</b>	<b>3.021.960.412</b>	<b>3.021.960.412</b>	<b>3.024.066.184</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

**C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra**

Target dan Analisis Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023-2026 sebagaimana pada tabel 3.1. berikut;

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TERGET KINERJA TAHUN 2023</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%

**BAB III**  
**KAPASITAS ORGANISASI**

**A. Analisis Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Aparatur Sipil Negara berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), sebagai berikut:

**Tabel III. A. 1**  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepala Dinas	-	-
2	Sekretis	Pembina/IV.a	1 Orang
3	Kepala Bidang	Pembina/IV.a	3 Orang
4	Kasubbag/Kasi	- Pembina/IV.a - Penata TK I/III.d - Penata /III.c	1 Orang 2 Orang 5 Orang
5	Pelaksana	- Penata TK I/III.d - Penata Muda/ III.a - Pengatur TK I/II.d - Pengatur II.c	2 Orang 1 Orang 3 Orang 1 Orang
6	Fungsional	- Penata TK I / III.d - Penata / III.c	2 Orang 1 Orang
7	THLS		5 Orang
	Total		27 Orang

**Tabel III.A. 2**  
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/ Golongan

<b>NO</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	IV-b	-
2	IV-a	5 Orang
3	III-d	6 Orang
4	III-c	6 Orang
5	III-b	-
6	III-a	1 Orang
7	II-d	3 Orang
8	II-c	1 Orang
9	II-b	-
	Total	22 Orang

**Tabel III.A. 3**  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	S-2	5 Orang
2	S-1	12 Orang
3	D-3	2 Orang
4	D-2	-
5	D-1	-
6	SMA / SMK / MA	3 Orang
Total		22 Orang

**Tabel III.A. 4**  
Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

<b>NO</b>	<b>DIKLAT PIM</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PIM II	-
2	PIM III	2 Orang
3	PIM IV	6 Orang
4	Prajabatan	14 Orang
Total		22 Orang

**Tabel III. A. 5**  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>		<b>JUMLAH</b>
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	-			0 Orang
2	Sekretaris	Pembina/IVa	1		1 Orang
3	Kepala Bidang	Pembina/IVa	3		3 Orang
4	Kasubbag/Kasi	- Pembina/IVa	1		1 Orang
		- Penata TK I/IIIId	5		5 Orang
		- Penata /IIIc		2	2 Orang
5	Pelaksana	- Penata TK I/IIIId	1	1	2 Orang
		- Penata Muda/ IIIa	1		1 Orang
		- Pengatur TK I/IId	2	1	3 Orang
		- Pengatur IIc	1		1 Orang
6	Fungsional	- Penata TK I / IIIId	2		2 Orang
		- Penata / IIIc	1		1 Orang
7	THLS		1	4	5 Orang
Total					27 Orang

**Tabel III.A.6**

Jumlah PNS Berdasarkan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PNS	2 Orang
Total		2 Orang

**Tabel III.A.7**

Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Teknis Perhubungan dan Teknis Lainnya

<b>NO</b>	<b>NAMA DIKLAT/BIMTEK</b>	<b>PENYELENGGARA DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan	Kemenhub	1 Orang
2	Bimtek Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	BPTD Wilayah VI Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Tahun 2018	3 Orang
3	Diklat Keselamatan Berlalu Lintas	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Badan Pengembangan SDM Kemenhub Tahun 2018	1 Orang
4	Pelatihan Penyusunan LAKIP	Pusdiklat Teknis dan fungsional Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pusat	0 Orang
5	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pusdiklat Manajemen Aparatur Negara	3 Orang
6	Sistem Administrasi Kepegawaian	Pusdiklat Manajemen Aparatur Negara	3 Orang
Total			12 Orang

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan beban kerja yang ada dan masih membutuhkan pegawai. Akan tetapi dengan jumlah SDM yang ada Dinas Perhubungan berupaya memaksimalkan Kinerja agar mencapai target.

## B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan alat penting/utama yang digunakan untuk dalam memberikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sebagai berikut:

**Tabel III.B.1**  
Sarana dan Prasarana

C.

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Bangunan:			
	a. Kantor	1	Unit	
	b. Terminal	2	Unit	
	c. Dermaga	4	Unit	
2.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor			
	a. Gedung Uji	1	Unit	
	b. Gedung Kantor	1	Unit	
	c. Pos Jaga	1	Unit	
	d. Kamar Mandi/WC	1	Unit	
	e. Jalan		Meter	
3.	Kendaraan:			
	a. Roda 4 (Empat)	3	Unit	
	b. Roda 2 (Dua)	5	Unit	
4.	Perlengkapan Kantor:			
	a. Lemari arsip (Kayu)	9	Unit	
	b. Lemari Arsip (Besi)	5	Unit	
	c. Meja kerja	42	Unit	
	d. Meja rapat	1	Unit	
	e. Kursi kerja	49	Unit	
	f. Filling Cabinet	10	Unit	
	g. Genset	3	Unit	
	h. Brangkas	3	Unit	
5.	Peralatan Kantor:			
	a. Komputer	1	Unit	
	b. Laptop	5	Unit	
	c. Printer	8	Unit	
	d. Infocus	1	Unit	
	e. Layar Screen	1	Unit	
	f. Faximile	1	Unit	
	g. Mesin Tik	9	Unit	

Berdasarkan data sarana dan Prasarana diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih belum memadai terutama peralatan kantor dan perlengkapan lapangan, kendaraan dinas, tempat parkir dan peralatan pada balai pengujian, belum adanya ketersediaan fasilitas disabilitas.

### C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.214.354.130,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran Strategis maupun program-program pendukung. Belanja operasi sebesar Rp. 3,057.354.130,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 157.000.000,- yang berasal dari APBD yang didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan serta 41 sub kegiatan. sedangkan anggaran Perubahan sebesar Rp.3.024.066.184,- yang diperuntukkan untuk Belanja operasi sebesar Rp. 2.867.066.184,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 157.000.000,- yang berasal dari APBD yang didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan serta 41 sub kegiatan. Adapun adanya perubahan anggaran pada Dinas Perhubungan karna adanya penataan belanja. dengan rincian belanja sebagai berikut :

**Tabel III.C. 1**  
**Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023**

Uraian	Anggaran Murni Tahun 2023		Uraian	Anggaran Perubahan Tahun 2023	
1	2		3	4	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	Rp.	265.300.000	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	Rp.	163.968.000
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp.	265.300.000	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp.	163.968.000
Retribusi Daerah	Rp.	265.300.000	Retribusi Daerah	Rp.	163.968.000
<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp.	3.214.354.130	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp.	3.024.066.184
<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp.	3.057.354.130	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp.	2.867.066.184
Belanja Pegawai	Rp.	2.209.112.400	Belanja Pegawai	Rp.	2.065.939.454
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	848.241.730	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	801.126.730
	Rp.			Rp.	
<b>BELANJA MODAL</b>	Rp.	157.000.000	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp.	157.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	7.000.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	157.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	150.000.000	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	

**BAB IV  
AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja**

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel IV. A.1  
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	(%)	$\frac{\sum \text{Kendaraan Umum Yang Layak Operasi}}{\sum \text{Seluruh Kendaraan Umum}} \times 100$	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2023

Berdasarkan formulasi pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi capaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2023 pada table sebagai berikut:

**Tabel IV. A. 2  
Capaian Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	35	42,7	122.00

Sumber : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2023

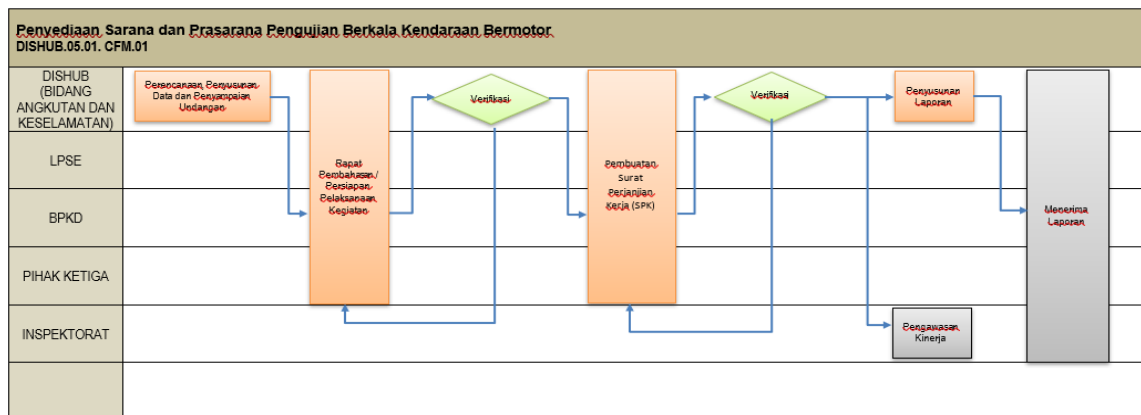


Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka terbalik angka target dan realisasinya. Dengan demikian capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat 122,00%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian kinerja, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya melalui Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Keselamatan angkutan jalan, Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengecekan kendaraan yang layak operasi, kendaraan yang over loading dan over dimensi, operasi gabungan jalan raya bersama instansi terkait. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Perhubungan sendiri diantaranya Sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS), memberikan rekomendasi kepada kendaraan yang akan numpang uji dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya.

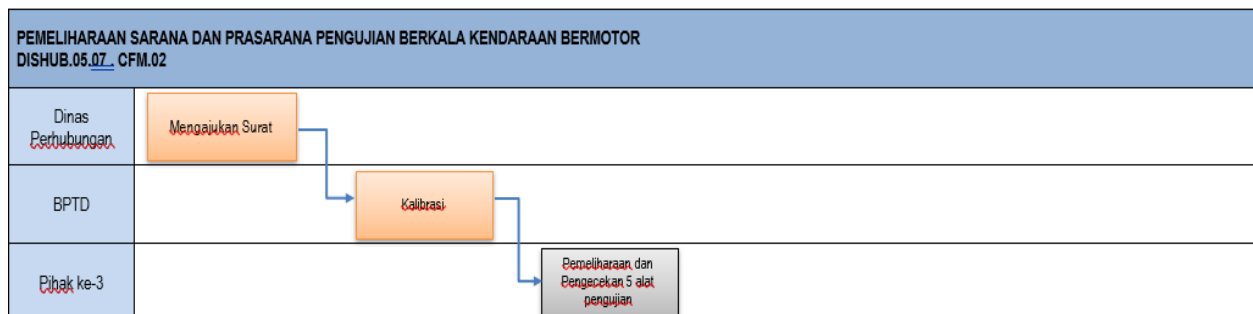
Telah tersedianya Gedung Uji Kendaraan Bermotor sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor laik jalan. Namun tingkat kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum yang telah melakukan pengujian belum patuh dan taat terhadap peraturan di jalan raya, maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas



Sumber Data : Peta Proses Bisnis Bidang Angkutan dan Keselamatan

Dalam peta proses bisnis ini Dinas Perhubungan pada Bidang angkutan dan Keselamatan melaksanakan penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah melakukan perencanaan penyusunan data dan penyampaian undangan ke LPSE untuk melakukan Rapat pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan kemudian dilakukan verifikasi oleh dinas perhubungan dilanjutkan dengan pembuatan dokumen surat perjanjian kerja (SPK) kemudian diverifikasi oleh LPSE setelah diverifikasi disampaikan kepada pihak ketiga untuk mempersiapkan dokumen pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang. Setelah proses

pengadaan selesai maka dilakukan pembayaran serta pemeriksaan barang. Hasil daripada pengadaan akan dilakukan penyusunan laporan akhir tahun.



Sumber Data : Peta Proses Bisnis Bidang Angkutan dan Keselamatan

Dalam peta proses bisnis ini Dinas Perhubungan pada Bidang angkutan dan Keselamatan melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor melakukan pengajuan surat ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan dalam rangka pengajuan kalibrasi alat pengujian. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan menunjuk tim ahli untuk melaksanakan kalibrasi kemudian tim ahli melakukan pengecekan dan pemeriksaan alat apabila diketahui ada alat pengujian yang rusak untuk dilaksanakan perbaikan.

Berikut adalah data kendaraan umum dan Kendaraan Yang Layak Beroperasi dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi sebagai hasil capaian kinerja nyata pada tahun 2023, yaitu :

**Tabel IV. A. 3**  
**Data Kendaraan Umum dan Data Kendaraan Yang Layak Beroperasi**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Nama Kendaraan	Banyaknya	Kendaraan Yang Layak Beroperasi
1	Kendaraan Barang Ringan ( Pick – UP)	1.792	703
2	Kendaraan Barang Sedang ( Truck)	511	260
3	Kendaraan Barang Berat ( Fuso)	9	9
4	Kendaraan Micro Bus	11	11
5	Kendaraan Angkutan Pedesaan ( Angdes)	17	17
Jumlah		2.340	1.000

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Keselamatan

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 (pertama) pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2023 – 2026 dimana capaian kinerja dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi adalah sebesar 122,00%. Dengan capaian kinerja yang bisa dikatakan melampaui dari target yang diperjanjikan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merasa optimis untuk memenuhi target kinerja pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan target akhir Renstra Dinas Perhubungan yaitu 100 %. Capaian kinerja ini meningkat dari tahun sebelumnya.

## B. Perbandingan Kinerja

### 1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel IV. B .1**  
**Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat**  
**Meningkatnya Jangkauan Transportasi Antar Wilayah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah	Presentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	36.76%	37,40%	38,24%	47,32%		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi					35%	42,7%

Sumber : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2021 dan 2022 serta 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 sama-sama telah melebihi target yang ditetapkan, persentasenya sama-sama melebihi 100%. Namun capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan sasaran dan indicator sasaran. Perbedaan ini seiring dengan perbedaan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Perubahan sasaran dan indicator sasaran ini terjadi karena perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

### 2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

**Tabel IV. B.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Lampung Barat dengan**  
**Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi	
1.	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	3,96%	4,55%	114,9%
2.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	73%	75%	102,7%
3.	Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	79,5%	80,55%	101,3%
4.	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Dinas Perhubungan	35%	42,7%	122%

Sumber Data : BPTD Kelas II Lampung

Seperti yang tertuang didalam table 2.1, bahwa indicator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan indicator kinerja Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja karena cakupan kinerja keduanya yang juga berbeda. Pada Kabupaten Lampung Barat, indicator kinerja ‘persentase kendaraan umum yang layak beroperasi’ ditetapkan karena kondisi geografis dan social ekonomi Masyarakat yang mayoritas petani menyebabkan mobilitas berpindah tempat antar daerah dalam kabupaten tidak terlalu padat layaknya di perkotaan. Namun tentu saja menyediakan kondisi umum yang layak beroperasi merupakan prioritas, mengingat kondisi jalan yang meski telah berupa aspal namun berliku-liku dan menanjak serta menurun. Hal ini menjadi factor pertimbangan yang penting untuk berkendara dengan kendaraan yang aman dan layak beroperasi. Sementara bagi Kementerian Perhubungan, tentu cakupan meliputi seluruh area transportasi darat di semua wilayah Indonesia. Sehingga indicator Sasaran nya pun lebih luas dan general. Meski begitu, melihat persentase capaian kinerja kedua organisasi pemerintah ini sama-sama telah berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan.

### 3. Perbandingan Kinerja dengan target dan atau capaian Kinerja Tingkat Propinsi

**Tabel IV. B. 3**  
**Analisis Capaian Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Lampung da Dinas Perhubungan Lampung Barat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi	
1	Rasio Konektivitas	Dishub Prov Lampung	72%	69,4%	96,38%
2	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Dishub Prov Lampung	85%	87,15%	102,52%
3	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan Spesifikasi Teknik	Dishub Prov Lampung	40%	47,45%	118,62%
4	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Dishub Kab. Lampung Barat	35%	42,7%	122%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk mengukur kinerjanya, sementara pada Dinas Perhubungan Lampung Barat terdapat 1 indikator kinerja. Rerata capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah mencapai 100%, meski ada 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, capaian kinerjanya adalah 122%.

#### **4. Benchmarking**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan (mengakomodir) ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Perbandingan kinerja yang ditetapkan dalam sub bagian ini adalah dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang merupakan instansi paling dekat hubungannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan Kementerian Perhubungan. Memang indikator kinerja keduanya berbeda, namun jika dilihat dari persentase capaian kinerja, keduanya telah sama-sama berhasil merealisasikan pencapaian target kinerja. Capaian kinerja ini bukan sekedar angka, melainkan juga menjadi gambaran betapa selama ini Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tergambar dalam capaian kinerja ini. Meski kebanyakan Masyarakat telah memiliki kendaraan, namun pemerintah tetap berkomitmen menyiapkan kendaraan umum yang layak beroperasi demi menyediakan fasilitas umum yang terbaik dan layak serta aman bagi Masyarakat. Utamanya bagi Masyarakat yang hendak bepergian antar wilayah dalam kabupaten dalam kondisi jalan dan cuaca yang sering kali hujan dan licin. Terlebih jika tiba waktu Masyarakat pulang kampung dalam agenda rutin idhul fitri dan hari-hari besar lainnya. tentu berkendara dengan kendaraan yang aman dan nyaman menjadi keharusan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

#### **C. Realisasi Anggaran**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2023. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran senilai Rp. 3.024.066.184, dengan realisasi anggaran senilai Rp. 2.905.338.089. Adapun rincian penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

**Tabel IV. C. 1**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	163.968.000	164.868.000	100,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.968.000	164.868.000	100,55
Retribusi Daerah	163.968.000	164.868.000	100,55
Retribusi Jasa Umum	133.020.000	130.520.000	98,12
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.020.000	75.520.000	96,80
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000	55.000.000	100,00
Retribusi Jasa Usaha	30.948.000	34.348.000	110,99
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000	2.700.000	150,00
Retribusi Terminal	6.300.000	6.300.000	100,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.848.000	25.348.000	110,94
Jumlah Pendapatan	163.968.000	164.868.000	100,55
BELANJA DAERAH	3.024.066.184	2.905.338.089	96,07
	3.024.066.184	2.905.338.089	96,07
Belanja Operasi	2.867.066.184	2.748.738.089	95,87
Belanja Modal	157.000.000	156.600.000	99,75
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.024.066.184	2.905.338.089	96,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.024.066.184	2.905.338.089	96,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.621.937.734	2.503.903.439	95,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.130.600	29.130.600	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.053.172.054	2.000.282.850	97,42
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	13.495.000	99,96
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.459.000	6.459.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.448.900	124.442.600	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.625.850	206.566.884	76,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.101.330	121.026.505	98,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	402.128.450	401.434.650	99,83
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.315.000	15.315.000	100,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	12.682.250	12.682.250	100,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	51.041.300	51.041.300	100,00

Fasilitas Parkir			
Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	243.302.500	242.743.700	99,77
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	189.625.000	189.066.200	99,71
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	79.787.400	79.652.400	99,83
JUMLAH PENDAPATAN	163.968.000	164.868.000	100,55
JUMLAH BELANJA	3.024.066.184	2.905.338.089	96,07

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **3.024.066.184,-**, telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 2.905.338.089,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 118.728.095** atau setara dengan 96,07%,.

#### **D. Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Keberhasilan Kepala Daerah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah konkrit yang baik dalam memenuhi harapan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk meyelenggarakan pemerintahan yang baik dan akuntabel sebagaimana harapan semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan dan merupakan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan, dengan Indikator : Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah dari target 35% mencapai 42,7%.%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tersebut, secara umum capaian kinerja dari indikator tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.024.066.184,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.905.338.089,-. Dengan demikian pada tahun 2023 terdapat Silpa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 118.728.095 atau 96,07%,-

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 yang menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2023 sebagai tahun ke 1 dari empat tahun yang direncanakan.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.905.338.089,-. (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Kinerja Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah 96,07 % dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Lampung Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.



**B. Faktor Pendukung Keberhasilan**

1. Masing – masing personil Dinas Perhubungan berusaha optimal melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik dengan stakeholder terkait
3. Hubungan kekeluargaan dan emosional antar pegawai terjalin dengan baik

**C. Permasalahan**

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga pengujian kendaraan bermotor dan lain lain.
2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan alat uji yang ada belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
3. Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
4. Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
6. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
7. Beralihnya fungsi Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan menjadi kendaraan Abudemen untuk para pelajar.
8. Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal.

**D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

1. Penambahan Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga pengujian kendaraan bermotor dan lain lain.
2. Penyediaan alat uji yang lengkap dan sarana untuk mendukung pengujian kendaraan sehingga laik jalan;
3. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
4. Penambahan angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
6. Melakukan sosialisasi agar Masyarakat memanfaatkan kendaraan umum yang ada.
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan / desa sebagai sarana transportasi pelajar.
8. Perlu adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Perlu dilaksanakannya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih disiplin dan meningkatkan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Mengoptimalkan Fungsi terminal dan dermaga.

Lampiran I :

Gambar 1. Alat Uji Timbangan (Axle Load Portable)



Gambar 2. Zoss (Zona Selamat Sekolah)



Gambar 3. Alat Uji Rem Kendaraan (Brake Tester)



Gambar 4. Peralatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor



Gambar 5. Launching Damri Perintis Liwa – Kebun Tebu, Kebun Tebu – Liwa dan Ram Check





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812  
Telp. (0728) 21144, Fax. (0728) 21144

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZA MAHENDRA,SH. M.H.**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**


Nama : **Drs. NUKMAN, M.M**  
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

  
**Drs. NUKMAN, M.M**  
NIP. 19681215 199512 1 005



Liwa, 9 Januari 2023

**Pihak Pertama,**

  
**REZA MAHENDRA, SH. M.H.**  
NIP. 19820423 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran : 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35,00%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.812.225.680	Dana Transfer Umum-DAU
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 402.128.450	Dana Transfer Umum-DAU

**JUMLAH ANGGARAN Rp. 3.214.354.130**

**PENDAPATAN ASLI DAERAH**

1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 199.216.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 66.084.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**JUMLAH Rp. 265.300.000**

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT



**Drs. NUKMAN, M.M.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681215 199512 1 005



diwahi, 9 Januari 2023  
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**REZA MAHENDRA, SH.M.H.**  
PEMBINA  
NIP. 19820423 201001 1 008





# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812  
Telp. (0728) 21144, Fax. (0728) 21144

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZA MAHENDRA,SH. M.H.**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. NUKMAN, M.M**  
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

**Drs. NUKMAN, M.M**  
NIP. 19681215 199512 1 005



Liwa, 20 Oktober 2023

**Pihak Pertama,**

**REZA MAHENDRA, SH. M.H.**  
NIP. 19820423 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan**  
**Tahun Anggaran : 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35,00%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.621.937.734	Dana Transfer Umum-DAU
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 402.128.450	Dana Transfer Umum-DAU


**JUMLAH ANGGARAN** **Rp. 3.024.066.184**

**PENDAPATAN ASLI DAERAH**

1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 133.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 30.948.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**JUMLAH** **Rp. 163.968.000**

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT

  
**Drs. NUKMAN, M.M.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681215 199512 1 005



Liwa, 10 Oktober 2023  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
LAMPUNG BARAT  
**REZA MAHENDRA, SH.M.H.**  
PEMBINA  
NIP. 19820423 201001 1 008

**Tabel 1**  
**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0%	0%	0%	35%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0%	0%	0%	35%	Kepala Dinas



Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lampung Barat

**Mahendra, SH.MH.**

Pembina

19820423 201001 1 008

**Tabel 2**  
**Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Perhubungan**  
**Periode 2023 - 2026**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
					TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	8	10	
1	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Trw 1 = 0	Trw 1 : Rp 617.844.048	Sekretaris	
					Trw 2 = 0	Trw 2 : Rp 1.409.296.864		
					Trw 3 = 0	Trw 3 : Rp 2.102.043.808		
					Trw 4 = 79.87	Trw 4 : Rp 2.619.831.962		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	Trw 1 = 11	Trw 1 : Rp 78.532.850	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan
						Trw 2 = 11	Trw 2 : Rp 354.037.550	
						Trw 3 = 11	Trw 3 : Rp 374.732.950	
						Trw 4 = 11	Trw 4 : Rp 402.128.450	
				-	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	Trw 1 = 3	Kepala Bidang Lalu Lintas	
						Trw 2 = 3		

					Trw 3 = 3		
					Trw 4 = 3		
		-	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar		Trw 1 = 95		
					Trw 2 = 95		
					Trw 3 = 95		
					Trw 4 = 95		



Pt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lampung Barat

**ahendra, SH.MH.**

Pembina

19820423 201001 1 008





**Tabel 3**  
**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Perhubungan**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						TARGET		TARGET		
1	2	3	4	5	6	7		9		11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun	Trw 1 = 22		Trw 1 = Rp 19.846.100		Kasubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 34		Trw 2 = Rp 26.900.600		
							Trw 3 = 41		Trw 3 = Rp 27.400.600	
					Trw 4 = 48		Trw 4 = Rp 29.130.600			
2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  - Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  - Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  - Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Trw 1 = 44		Trw 1 = Rp 439.410.668		Kasubag Keuangan
						Trw 2 = 47		Trw 2 = Rp 1.034.962.934		
						Trw 3 = 47		Trw 3 = Rp 1.628.362.078		
						Trw 4 = 48		Trw 3 = Rp 2.053.601.282		
3.			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  - Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  - Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  - Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  - Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  - Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 12		Trw 1 = Rp 1.000.000		Kasubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 16		Trw 2 = Rp 13.500.000		
						Trw 3 = 16		Trw 3 = Rp 13.500.000		
						Trw 4 = 16		Trw 4 = Rp 13.500.000		



4.			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Peranokat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Peranokat Daerah</li> </ul>	Trw 1 = - Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 2.500.000 Trw 3 = Rp 2.500.000 Trw 4 = Rp 2.500.000	Kasubag Keuangan
5.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pegawai</li> <li>- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</li> <li>- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> </ul>	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 4.050.000 Trw 2 = Rp 4.853.000 Trw 3 = Rp 5.656.000 Trw 4 = Rp 6.459.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
6.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	Trw 1 = 9 Trw 2 = 15 Trw 3 = 21 Trw 4 = 30	Trw 1 = Rp 13.039.200 Trw 2 = Rp 73.115.000 Trw 3 = Rp 85.427.800 Trw 4 = Rp 98.413.900	Kasubag Umum dan Perencanaan
7.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</li> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</li> </ul>	Trw 1 = 19 Trw 2 = 19 Trw 3 = 19 Trw 4 = 19	Trw 1 = Rp 72.860.500 Trw 2 = Rp 155.932.250 Trw 3 = Rp 226.618.750 Trw 4 = Rp 293.125.850	Kasubag Keuangan
8.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</li> </ul>	Trw 1 = 11 Trw 2 = 12 Trw 3 = 16 Trw 4 = 16	Trw 1 = Rp 96.537.580 Trw 2 = Rp 128.133.080 Trw 3 = Rp 151.978.580 Trw 4 = Rp 171.101.330	Kasubag Umum dan Perencanaan
9.		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</li> <li>- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</li> </ul>	Trw 1 = 7 Trw 2 = 7	Trw 1 = Rp 15.315.000 Trw 2 = Rp 15.315.000	Kasi Sarana

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</li> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</li> <li>- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</li> </ul>	Trw 3 = 7	Trw 3 = Rp 15.315.000		
					Trw 4 = 7	Trw 4 = Rp 15.315.000		
10.		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal</li> <li>- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</li> <li>- Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan</li> <li>- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara</li> <li>- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya</li> </ul>	Trw 1 = 2	Trw 1 = Rp 12.682.250	Kasi Perparkiran	
					Trw 2 = 2	Trw 2 = Rp 12.682.250		
					Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp 12.682.250		
					Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp 12.682.250		
11.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp 16.665.500	Kasi Perparkiran	
					Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp 27.210.800		
					Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp 36.960.800		
					Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 51.041.300		
12.		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> <li>- Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> <li>- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</li> <li>- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</li> <li>- Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</li> <li>- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> <li>- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</li> <li>- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul>	Trw 1 = 2	Trw 1 = Rp 19.237.500	Kasi Keselamatan dan Kemitraan	
					Trw 2 = 7	Trw 2 = Rp 243.302.500		
					Trw 3 = 7	Trw 3 = Rp 243.302.500		
					Trw 4 = 7	Trw 4 = Rp 243.302.500		

13.			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kotaerkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> <li>- Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> <li>- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Trw 1 = 26</p> <p>Trw 2 = 26</p> <p>Trw 3 = 36</p> <p>Trw 4 = 46</p>	<p>Trw 1 = Rp 14.632.600</p> <p>Trw 2 = Rp 55.527.000</p> <p>Trw 3 = Rp 66.472.400</p> <p>Trw 4 = Rp 79.787.400</p>	Kasi Pengendalian & Operasional dan Kasi Rekayasa Lalu Lintas
-----	--	--	--	--	--	---	---	---


  
 Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Lampung Barat  
**Reza Hendra, SH.MH.**  
 Pembina  
 19820423 201001 1 008

**Tabel 4**  
**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Perhubungan**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	10		12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 10 Trw 2 = 10 Trw 3 = 10 Trw 4 = 13	Trw 1 = Rp 3.822.500 Trw 2 = Rp 4.370.000 Trw 3 = Rp 4.370.000 Trw 4 = Rp 5.000.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
2.				Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 3.500.000 Trw 2 = Rp 3.500.000 Trw 3 = Rp 3.500.000 Trw 4 = Rp 3.500.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
3.				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 2.456.000 Trw 2 = Rp 2.831.000 Trw 3 = Rp 2.831.000 Trw 4 = Rp 2.831.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
4.				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 3.565.100 Trw 2 = Rp 3.565.100 Trw 3 = Rp 3.565.100 Trw 4 = Rp 3.565.100	Kasubag Umum dan Perencanaan	

5.				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 750.000 Trw 2 = Rp 3.704.000 Trw 3 = Rp 3.704.000 Trw 4 = Rp 3.704.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
6.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = Rp 2.280.500 Trw 2 = Rp 4.030.500 Trw 3 = Rp 4.530.500 Trw 4 = Rp 5.530.500	Kasubag Umum dan Perencanaan
7.				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 4 Trw 2 = 8 Trw 3 = 12 Trw 4 = 16	Trw 1 = Rp 3.472.000 Trw 2 = Rp 4.900.000 Trw 3 = Rp 4.900.000 Trw 4 = Rp 5.000.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
8.			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 25 Trw 2 = 25 Trw 3 = 25 Trw 4 = 25	Trw 1 = Rp 435.731.168 Trw 2 = Rp 1.029.425.334 Trw 3 = Rp 1.622.824.478 Trw 4 = Rp 2.044.928.682	Kasubag Keuangan
9.				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.000.000 Trw 2 = Rp 1.000.000 Trw 3 = Rp 1.000.000 Trw 4 = Rp 1.000.000	Kasubag Keuangan
10.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp - Trw 3 = Rp - Trw 4 = Rp 3.135.000	Kasubag Keuangan

11.				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	Kasubag Keuangan
12.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Trw 1 = 16 Trw 2 = 18 Trw 3 = 18 Trw 4 = 18	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	1.679.500 2.047.600 2.047.600 2.047.600	Kasubag Keuangan
13.				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	- 1.490.000 1.490.000 1.490.000	Kasubag Keuangan
14.			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	- 1.000.000 1.000.000 1.000.000	Kasubag Keuangan
15.				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp	- 7.000.000 7.000.000 7.000.000	Kasubag Keuangan

16.				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 12 Trw 2 = 12 Trw 3 = 12 Trw 4 = 12	Trw 1 = Rp 1.000.000 Trw 2 = Rp 1.000.000 Trw 3 = Rp 1.000.000 Trw 4 = Rp 1.000.000	Kasubag Keuangan
17.				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 1.500.000 Trw 3 = Rp 1.500.000 Trw 4 = Rp 1.500.000	Kasubag Keuangan
18.				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 3.000.000 Trw 3 = Rp 3.000.000 Trw 4 = Rp 3.000.000	Kasubag Keuangan
19.			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 2.500.000 Trw 3 = Rp 2.500.000 Trw 4 = Rp 2.500.000	Kasubag Keuangan
20.			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 4.050.000 Trw 2 = Rp 4.853.000 Trw 3 = Rp 5.656.000 Trw 4 = Rp 6.459.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
21.			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.990.000 Trw 2 = Rp 4.501.000 Trw 3 = Rp 6.407.000 Trw 4 = Rp 8.256.000	Kasubag Umum dan Perencanaan

22.				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 10.209.200 Trw 2 = Rp 19.012.000 Trw 3 = Rp 27.559.800 Trw 4 = Rp 36.041.900	Kasubag Umum dan Perencanaan
23.				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 4	Trw 1 = Rp 840.000 Trw 2 = Rp 2.100.000 Trw 3 = Rp 3.360.000 Trw 4 = Rp 4.200.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
24.				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 0 Trw 2 = 3 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 2.332.000 Trw 3 = Rp 2.931.000 Trw 4 = Rp 4.746.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
25.				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 45.170.000 Trw 3 = Rp 45.170.000 Trw 4 = Rp 45.170.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
26.			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 5.676.000 Trw 2 = Rp 16.450.000 Trw 3 = Rp 21.979.000 Trw 4 = Rp 27.545.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
27.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 13 Trw 2 = 13 Trw 3 = 13 Trw 4 = 13	Trw 1 = Rp 30.930.000 Trw 2 = Rp 61.560.000 Trw 3 = Rp 92.090.000 Trw 4 = Rp 117.770.000	Kasubag Umum dan Perencanaan



28.				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 4 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 4	Trw 1 = Rp 36.254.500 Trw 2 = Rp 77.922.250 Trw 3 = Rp 112.549.750 Trw 4 = Rp 147.810.850	Kasubag Umum dan Perencanaan
29.			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 7 Trw 2 = 7 Trw 3 = 7 Trw 4 = 7	Trw 1 = Rp 45.150.000 Trw 2 = Rp 74.800.000 Trw 3 = Rp 93.700.000 Trw 4 = Rp 112.600.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
30.				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 3 Trw 2 = 4 Trw 3 = 8 Trw 4 = 8	Trw 1 = Rp 3.297.000 Trw 2 = Rp 5.242.500 Trw 3 = Rp 10.188.000 Trw 4 = Rp 10.410.750	Kasubag Umum dan Perencanaan
31.				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 48.090.580 Trw 2 = Rp 48.090.580 Trw 3 = Rp 48.090.580 Trw 4 = Rp 48.090.580	Kasubag Umum dan Perencanaan
32.		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 1 = 7 Trw 2 = 7 Trw 3 = 7 Trw 4 = 7	Trw 1 = Rp 15.315.000 Trw 2 = Rp 15.315.000 Trw 3 = Rp 15.315.000 Trw 4 = Rp 15.315.000	Kasi Sarana

33.			<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 12.682.250 Trw 2 = Rp 12.682.250 Trw 3 = Rp 12.682.250 Trw 4 = Rp 12.682.250	Kasi Prasarana
34.			<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 16.665.500 Trw 2 = Rp 27.210.800 Trw 3 = Rp 36.960.800 Trw 4 = Rp 51.041.300	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Gustim)
35.			<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 189.625.000 Trw 3 = Rp 189.625.000 Trw 4 = Rp 189.625.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Samsun)
36.				Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 16.410.000 Trw 2 = Rp 25.850.000 Trw 3 = Rp 25.850.000 Trw 4 = Rp 25.850.000	Kasi Angkutan Penumpang
37.				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Trw 1 = 0 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 4	Trw 1 = Rp 2.827.500 Trw 2 = Rp 27.827.500 Trw 3 = Rp 27.827.500 Trw 4 = Rp 27.827.500	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Samsun)

38.			<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kotaerkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Trw 1 = Rp 3.380.600 Trw 2 = Rp 33.570.600 Trw 3 = Rp 37.030.600 Trw 4 = Rp 46.490.600	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Yusri)
39.				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Trw 1 = 10 Trw 2 = 10 Trw 3 = 20 Trw 4 = 30	Trw 1 = Rp 3.727.000 Trw 2 = Rp 3.727.000 Trw 3 = Rp 6.842.400 Trw 4 = Rp 8.572.400	Kasi Manajemen Lalu Lintas
40.				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 4.150.000 Trw 2 = Rp 8.444.400 Trw 3 = Rp 12.814.400 Trw 4 = Rp 14.939.400	Kasi Rekayasa Lalu Lintas
41.				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Trw 1 = Rp 3.375.000 Trw 2 = Rp 9.785.000 Trw 3 = Rp 9.785.000 Trw 4 = Rp 9.785.000	Kasi Angkutan Barang



Pt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lampung Barat

**Mahendra, SH.MH.**

Pembina

19820423 201001 1 008

